



AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI HEGEMONI AMERIKA SERIKAT

Pudoli Sandra, Dwi Sriyantini

Email: sandrapudoli@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman

ABSTRAK

Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan salah satu dinamika geopolitik paling kompleks di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam mendukung operasi Israel terhadap Iran menimbulkan berbagai perdebatan hukum internasional, khususnya terkait prinsip larangan penggunaan kekuatan (prohibition of the use of force) sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dengan kepentingan politik kawasan Timur Tengah serta strategi geopolitik Amerika Serikat dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan militer yang dilakukan Israel dan didukung Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan keseimbangan kekuatan regional, mengendalikan pengaruh Iran, serta menjaga kepentingan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari perspektif hukum internasional, legalitas tindakan tersebut masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan interpretasi mengenai hak bela diri (self-defence) dan prinsip kedaulatan negara

Kata Kunci: Agresi Militer, Iran, Israel, Amerika Serikat, Hukum Internasional

1. PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah diakui sebagai wilayah strategis dalam politik internasional, berfungsi sebagai pusat energi global dan arena persaingan kekuatan regional dan global dalam politik, ekonomi, dan keamanan. Konflik Iran-Israel telah menjadi isu geopolitik penting yang mempengaruhi

stabilitas regional dan global. (Buana et al., 2024)

Sejak Revolusi Iran 1979, hubungan antara Iran dan Israel mengalami perubahan signifikan; sebelumnya cukup baik, kini terhambat oleh perubahan kebijakan luar negeri Iran yang melihat Israel sebagai simbol dominasi Barat, sementara Israel menganggap



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Srijantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625558

Iran sebagai ancaman bagi keamanan dan stabilitas regional. (Buana et al., 2024)

Konflik ini melampaui hubungan bilateral, berkembang menjadi rivalitas geopolitik yang melibatkan aktor internasional, terutama Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel. Dukungan militer dan politik AS menyoroti dimensi strategis konflik ini, yang terkait dengan kepentingan keamanan energi global dan pengaruh politik AS di kawasan. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026) (Buana et al., 2024)

Tindakan militer Israel terhadap kepentingan Iran dan kelompok afiliasinya sering didukung oleh AS, menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya—apakah untuk keamanan kawasan atau sebagai bagian dari strategi dominasi geopolitik AS. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Eskalasi konflik juga menghadirkan tantangan dalam perspektif hukum internasional, di mana penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain dilarang kecuali dalam kondisi tertentu menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, analisis mengenai konflik Iran-Israel dan keterlibatan AS perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek geopolitik, tetapi juga prinsip hukum internasional yang berlaku. (United Nations, 1945, Art. 2(4)), (United Nations, 1945, Art. 51).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum

internasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh suatu negara terhadap negara lain, khususnya ketentuan yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 Tahun 1974 tentang Definisi Agresi. (United Nations, 1945, Art. 2(4)) (United Nations General Assembly, 1974) Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan agresi militer, hak membela diri (self-defence), hegemoni, serta geopolitik dalam hubungan internasional. Bahan hukum primer meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 Tahun 1974. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas konflik Iran-Israel, geopolitik Timur Tengah, kebijakan pertahanan, serta dampak konflik terhadap stabilitas ekonomi global dan keamanan internasional. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026) (Buana et al., 2024) Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk mengkaji apakah tindakan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dapat dikategorikan sebagai bentuk agresi menurut hukum internasional serta sejauh mana tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024) (Dinstein, 2022).



3. PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Konflik Iran–Israel dan Keterlibatan Amerika Serikat

Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu konflik yang paling kompleks di kawasan Timur Tengah karena melibatkan faktor ideologi, politik, keamanan, dan kepentingan strategis berbagai aktor internasional. Ketegangan antara kedua negara meningkat secara signifikan setelah Revolusi Iran tahun 1979 yang mengubah orientasi politik luar negeri Iran dan menempatkan Israel sebagai salah satu pihak yang dianggap mengancam kepentingan nasional Iran. (Buana et al., 2024)

Dalam perkembangan, konflik Iran–Israel tidak hanya berlangsung dalam bentuk konfrontasi politik dan diplomatik, tetapi juga berkembang melalui perang proksi, operasi intelijen, serangan siber, serta dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di berbagai negara Timur Tengah. Pola konflik tersebut menunjukkan bahwa persaingan antara Iran dan Israel telah berkembang menjadi konflik multidimensional yang melibatkan berbagai aktor regional maupun internasional. (Buana et al., 2024)

Amerika Serikat menjadi salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam dinamika konflik tersebut. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat secara konsisten memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer yang bertujuan memperkuat posisi Israel dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan di kawasan. Dukungan tersebut menjadikan konflik Iran–Israel tidak lagi sekadar konflik bilateral, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Bagi Amerika Serikat dan Israel, program nuklir Iran serta meningkatnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan yang selama ini terbangun. Sebaliknya, Iran menilai berbagai kebijakan tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel sebagai bentuk intervensi yang mengancam kedaulatan negara. (Buana et al., 2024)

Kondisi tersebut menyebabkan konflik Iran–Israel terus mengalami eskalasi dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan maupun hubungan internasional secara lebih luas. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

3.2 Kepentingan Geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Selain menjadi salah satu pusat produksi energi terbesar di dunia, kawasan ini juga menjadi jalur perdagangan internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Salah satu kepentingan utama Amerika Serikat di Timur Tengah adalah menjaga keamanan Israel sebagai sekutu strategis. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel menunjukkan bahwa keamanan



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Sriyantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625560

Israel merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025)

Selain faktor keamanan, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruh geopolitiknya di kawasan. Dalam perspektif hubungan internasional, negara yang memiliki posisi dominan cenderung berupaya mempertahankan pengaruhnya terhadap wilayah yang dianggap strategis. Dalam konteks ini, meningkatnya pengaruh Iran di Timur Tengah sering dipandang sebagai tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. (Buana et al., 2024)

Pengaruh Iran yang semakin besar melalui hubungan politik dan militernya dengan berbagai kelompok di Timur Tengah dipandang dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diambil Amerika Serikat terhadap Iran sering kali bertujuan untuk membatasi pengaruh Iran sekaligus mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai aktor utama di kawasan. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan penting keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah. Stabilitas kawasan sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia dan keamanan jalur distribusi energi internasional. Gangguan terhadap stabilitas kawasan dapat berdampak langsung pada perekonomian global maupun kepentingan ekonomi Amerika Serikat. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

3.3 Analisis Agresi Militer terhadap Iran dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam hukum internasional modern, penggunaan kekuatan antarnegara umumnya dilarang, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi perdamaian dan mencegah konflik bersenjata setelah Perang Dunia II. Meskipun demikian, Pasal 51 PBB memberikan pengecualian untuk hak membela diri jika suatu negara menghadapi ancaman bersenjata.

Dalam konflik antara Iran dan Israel, tindakan militer oleh Israel dan Amerika Serikat sering diargumenkan untuk melindungi keamanan nasional. Namun, konsep pembelaan diri preventif masih diperdebatkan dalam ranah hukum internasional karena kurangnya pengaturan yang jelas dalam Piagam PBB.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 Tahun 1974 mendefinisikan agresi sebagai penggunaan kekuatan yang merugikan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, legalitas tindakan militer terhadap Iran harus ditinjau berdasarkan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan legalitas dalam hukum internasional. Penilaian terhadap intervensi militer AS dan Israel harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, bukan hanya faktor politik dan keamanan.

3.4 Dampak Konflik terhadap Stabilitas Kawasan Timur Tengah



Konflik Iran–Israel memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan Timur Tengah. Meningkatnya ketegangan antara kedua negara berpotensi memperluas konflik melalui keterlibatan negara-negara lain maupun kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan salah satu pihak. (Buana et al., 2024)

Selain meningkatkan risiko konflik bersenjata yang lebih luas, ketegangan antara Iran dan Israel juga mendorong perlombaan senjata di kawasan. Negara-negara Timur Tengah cenderung meningkatkan kapasitas pertahanan mereka sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan regional. (Buana et al., 2024)

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut semakin meningkatkan kompleksitas situasi keamanan kawasan. Dukungan yang diberikan kepada Israel sering kali dipandang sebagai faktor yang memperkuat polarisasi politik di Timur Tengah dan memperbesar potensi konflik antarnegara. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Konflik yang berkepanjangan juga dapat menghambat berbagai upaya kerja sama regional dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pembangunan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog internasional menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dalam jangka panjang. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025)

3.5 Implikasi Konflik terhadap Stabilitas Ekonomi Global dan Indonesia

Konflik Iran–Israel tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap

perekonomian global. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia sehingga setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi harga energi internasional. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Ketegangan yang meningkat dapat mengganggu jalur distribusi energi, khususnya di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Bagi Indonesia, konflik tersebut dapat berdampak pada meningkatnya harga energi, biaya impor, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, ketidakpastian global yang muncul akibat konflik juga dapat memengaruhi investasi, perdagangan internasional, dan nilai tukar mata uang. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Di sisi lain, konflik yang berkepanjangan juga dapat mendorong Indonesia untuk memperkuat kebijakan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi maupun pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026).

3.6 Hegemoni Amerika Serikat dalam Politik Timur Tengah

Konflik antara Iran dan Israel tidak dapat dipisahkan dari upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruh serta kepentingannya di kawasan Timur Tengah.



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Sriyantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625562

Dalam konteks hubungan internasional, konsep hegemoni dapat diartikan sebagai kapasitas suatu negara untuk memengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan keamanan negara lain demi mendukung kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat, sebagai salah satu kekuatan global utama, telah lama menganggap Timur Tengah sebagai wilayah strategis yang signifikan bagi kepentingan politik dan ekonominya.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat telah proaktif dalam membangun jaringan kolaborasi dengan negara-negara di Timur Tengah. Kehadiran militernya, hubungan diplomatik, dan berbagai bentuk kerja sama keamanan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempertahankan pengaruh di kawasan ini. Dalam hal ini, Israel memainkan peran yang sangat crucial, dipandang sebagai sekutu strategis yang dapat mendukung sejumlah kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel tidak hanya didasari oleh kesamaan kepentingan di bidang keamanan, tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik yang lebih luas. Dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel selama beberapa dekade mencerminkan bahwa keamanan dan keberlangsungan Israel dianggap sebagai bagian integral dari kepentingan strategis Amerika Serikat. Oleh karena itu, setiap ancaman yang dihadapi Israel sering kali dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Dalam konteks perkembangan konflik Iran-Israel, Iran sering kali diidentifikasi sebagai

salah satu negara yang berpotensi mengurangi dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Ekspansi pengaruh Iran melalui hubungan politik dan militernya dengan berbagai kelompok di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi dinamika politik dan keamanan di tingkat regional.

Dari perspektif geopolitik, meningkatnya pengaruh Iran dapat mengubah keseimbangan kekuatan yang selama ini menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai respons, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan dukungan militer kepada Israel, sering kali dipandang sebagai upaya untuk membatasi pengaruh Iran serta menjaga posisi Amerika Serikat sebagai aktor dominan di kawasan Timur Tengah.

Selain aspek keamanan dan politik, kepentingan ekonomi juga memainkan peranan penting dalam mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Timur Tengah, yang kaya akan cadangan minyak dan gas, menjadi regional yang sangat vital, di mana stabilitasnya memiliki dampak langsung terhadap perekonomian global. Dalam konteks ini, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa jalur distribusi energi internasional tetap aman serta tidak berada di bawah kendali kekuatan yang bisa mengancam kepentingannya.

Melalui dukungan politik dan militer bagi Israel serta keberadaan pangkalan militer dan kerja sama keamanan dengan negara-negara regional, Amerika Serikat berusaha menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Kehadiran



militer di negara-negara seperti Bahrain, Qatar, dan Kuwait menggambarkan bahwa kawasan ini masih dianggap sebagai wilayah strategis yang sangat penting bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Keberadaan pangkalan tersebut memungkinkan Amerika Serikat untuk merespons secara cepat berbagai perkembangan keamanan sambil menjaga stabilitas sesuai dengan kepentingan strategisnya.

Dalam konteks geopolitik, pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap Israel, tetapi juga berupaya menjaga agar keseimbangan kekuatan regional tetap menguntungkan bagi kepentingan tersebut. Meningkatnya pengaruh Iran melalui kerja sama dengan berbagai aktor regional dipandang dapat mengurangi kebebasan Amerika Serikat dalam merumuskan kebijakan keamanan kawasan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil terhadap Iran sering dikaitkan dengan usaha untuk menjaga dominasi Amerika Serikat dalam konteks politik Timur Tengah.

Selain faktor keamanan, dominasi Amerika Serikat di kawasan juga terhubung dengan kepentingan ekonomi global, khususnya dalam hal keamanan jalur distribusi energi internasional. Mengingat bahwa Timur Tengah adalah salah satu sumber energi utama di dunia, stabilitas kawasan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Amerika Serikat sering dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan keamanan pasokan energi dan mempertahankan pengaruh terhadap dinamika ekonomi internasional.

Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel tidak dapat dilihat hanya sebagai dukungan kepada sekutu strategisnya. Lebih jauh, konflik ini mencerminkan upaya yang lebih komprehensif untuk mempertahankan hegemoni politik, ekonomi, dan keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

3.7 Analisis Konflik Iran-Israel dalam Perspektif Teori Realisme

Teori realisme merupakan salah satu kerangka berpikir utama dalam studi hubungan internasional, yang menekankan bahwa negara merupakan aktor dominan dalam sistem global, beroperasi sesuai dengan kepentingan nasional mereka masing-masing. Dari sudut pandang realis, sistem internasional diakui sebagai anarkis, artinya tidak terdapat otoritas tertinggi yang efektif dalam mengatur hubungan antarnegara. Oleh karena itu, setiap negara berupaya untuk memperkuat kekuatan dan pengaruhnya demi menjaga keamanan serta kelangsungan eksistensinya.

Konflik antara Iran dan Israel dapat dianalisis melalui lensa realisme, di mana kedua bangsa tersebut berusaha untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional mereka masing-masing. Israel melihat perkembangan kapasitas militer Iran, termasuk program nuklir dan pengaruhnya di kawasan, sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Di sisi lain, Iran menilai keberadaan Israel dan dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai kendala terhadap aspirasi politik dan strategisnya di Timur Tengah.

Dalam pemikiran realis, konflik biasanya timbul akibat persaingan kekuatan antarnegara. Persaingan ini tidak selalu berakar dari perbedaan ideologi, melainkan



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Sriyantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625564

lebih dipengaruhi oleh upaya masing-masing negara untuk mempertahankan atau memperbaiki posisi mereka dalam tatanan kekuasaan internasional. Dalam konteks sengketa antara Iran dan Israel, kedua negara berupaya untuk mengukuhkan pengaruh mereka di Timur Tengah, sehingga tercipta kompetisi yang berkelanjutan dalam ranah politik, militer, dan keamanan.

Lebih lanjut, teori realisme juga menekankan pentingnya prinsip keseimbangan kekuatan. Negara-negara cenderung membentuk aliansi untuk menghadapi ancaman yang dianggap dapat mengganggu kepentingan mereka. Hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel dapat dipahami sebagai aliansi strategis yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dukungan militer, ekonomi, dan politik yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel menunjukkan adanya kepentingan bersama dalam mengatasi pengaruh Iran di wilayah tersebut.

Sebaliknya, Iran berupaya untuk memperkuat posisinya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai aktor regional yang memiliki kepentingan serupa. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya di sejumlah negara Timur Tengah menunjukkan strategi untuk memperluas pengaruh sekaligus menciptakan keseimbangan terhadap dominasi Amerika Serikat dan Israel.

Dari perspektif realisme, penyelesaian konflik Iran-Israel tampaknya sulit dicapai secara permanen selama kedua pihak masih menganggap satu sama lain sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. Dalam situasi

ini, setiap upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk meningkatkan keamanannya dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lainnya, sehingga memperpanjang dilema keamanan yang ada.

Dengan demikian, teori realisme menggarisbawahi bahwa konflik antara Iran dan Israel tidak hanya merupakan isu ideologi atau perbedaan politik semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari persaingan kekuatan serta kepentingan nasional dalam sistem internasional yang kompetitif. Oleh karenanya, penyelesaian konflik ini memerlukan suatu mekanisme yang dapat mengurangi persepsi ancaman dan membangun keseimbangan kepentingan di antara para aktor yang terlibat.

3.8 Legalitas Klaim Self-Defense Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran

Salah satu topik yang paling sering diperdebatkan dalam konteks konflik Iran-Israel adalah keabsahan penggunaan kekuatan militer yang diklaim berdasarkan hak untuk membela diri. Dalam kerangka hukum internasional, hak ini diakui melalui Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi serangan bersenjata terhadap wilayah atau kepentingannya. Namun, pelaksanaan hak ini mesti berada dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional. Secara praktis, Israel dan Amerika Serikat sering kali mengklaim bahwa tindakan militer mereka, yang diarahkan pada target yang dianggap mengancam, didorong oleh kepentingan keamanan nasional. Serangan terhadap fasilitas militer, ilmuwan nuklir, serta kelompok yang diduga memiliki afiliasi



dengan Iran sering kali dihubungkan dengan upaya untuk mencegah ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Situasi ini memicu perdebatan tentang batasan penggunaan hak membela diri di dalam hukum internasional. Yoram Dinstein menyatakan bahwa pelaksanaan hak membela diri harus memenuhi prinsip-prinsip necessity (kebutuhan) dan proportionality (proporsionalitas). Prinsip kebutuhan menuntut agar tindakan militer hanya dilakukan jika tidak ada alternatif damai yang lebih layak, sementara prinsip proporsionalitas menekankan bahwa tindakan yang diambil tidak boleh melebihi tingkat ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, tidak semua tindakan militer dapat secara otomatis dibenarkan semata-mata atas dasar hak membela diri.

Dalam konteks hukum internasional modern, pada umumnya penggunaan kekuatan oleh suatu negara terhadap negara lain dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, setiap aksi militer perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.

Perdebatan mengenai hak membela diri tetap menjadi salah satu isu paling rumit dalam hukum internasional. Ketidaksesuaian penafsiran mengenai adanya ancaman yang langsung maupun potensi sering menyebabkan penafsiran yang berbeda terkait keabsahan tindakan militer yang diambil oleh suatu negara.

Dalam hukum internasional, penerapan hak membela diri tidak hanya diwajibkan untuk

memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, tetapi juga harus menunjukkan keberadaan ancaman yang nyata dan mendesak. Dengan demikian, sebuah negara tidak dapat secara umum mengklaim alasan keamanan nasional sebagai dasar untuk melakukan tindakan militer terhadap negara lain tanpa adanya bukti yang cukup tentang ancaman tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan konsep pembelaan diri yang dapat memicu meningkatnya konflik bersenjata antarnegara.

Perdebatan mengenai ruang lingkup hak membela diri terus berkembang seiring munculnya ancaman keamanan modern yang bersifat transnasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa negara perlu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari serangan yang dapat mengancam keselamatan warga dan keamanan nasional. Namun, pandangan ini berpotensi memperluas penafsiran Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara berlebihan, sehingga dapat mengurangi efektivitas prinsip larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

Dalam konteks konflik antara Iran dan Israel, perbedaan penafsiran terhadap konsep pembelaan diri mencerminkan bahwa masalah hukum internasional sering kali tak terpisahkan dari kepentingan politik dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap aksi militer yang dilakukan berdasarkan hak membela diri harus dianalisis secara objektif, berdasarkan pada fakta, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Diskusi menjadi semakin rumit dengan munculnya konsep pembelaan diri preventif, yang merujuk pada tindakan militer yang



ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625566

dilakukan untuk mencegah ancaman sebelum serangan bersenjata benar-benar terjadi. Para pendukung konsep ini berargumen bahwa kemajuan teknologi senjata modern dan ancaman non-konvensional mengharuskan negara untuk bertindak proaktif dalam menjaga keamanan nasional. Namun, banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa konsep ini berpotensi disalahgunakan karena kurangnya landasan yang jelas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. tambahan pula, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 tahun 1974 menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain dapat dikategorikan sebagai agresi. Oleh karena itu, tindakan militer terhadap Iran perlu dievaluasi berdasarkan fakta dan kondisi yang melatarbelakanginya untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai bentuk pembelaan diri yang sah atau justru merupakan agresi yang dilarang oleh hukum internasional. Dalam konteks konflik Iran–Israel, perbedaan interpretasi mengenai konsep pembelaan diri menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Negara sering kali memprioritaskan kepentingan strategis, sedangkan hukum internasional berusaha membatasi penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Maka dari itu, legalitas tindakan militer yang diambil oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak dapat dianalisis hanya dari perspektif politik dan keamanan semata. Sebuah analisis juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan, sehingga dapat ditentukan apakah tindakan tersebut memiliki landasan hukum yang sah atau

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam sistem hukum internasional.

3.9 Posisi Indonesia terhadap Konflik Iran–Israel dalam Perspektif Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional, termasuk dalam menyikapi konflik Iran–Israel. Prinsip bebas aktif mengandung makna bahwa Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025)

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional. Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa penggunaan kekuatan militer secara berlebihan hanya akan memperbesar risiko eskalasi konflik dan memperburuk stabilitas kawasan maupun global. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (United Nations, 1945, Art. 2(4))

Konflik Iran–Israel juga memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi dan terhubung dengan sistem perdagangan internasional, Indonesia berpotensi merasakan dampak ekonomi akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Gangguan terhadap distribusi energi global dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya



memengaruhi kondisi ekonomi nasional. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Selain dampak ekonomi, konflik tersebut juga berpotensi memengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia. Ketidakstabilan keamanan global dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional, baik melalui peningkatan kapasitas pertahanan maupun melalui penguatan diplomasi internasional. Dalam konteks ini, Indonesia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025)

Sebagai anggota PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai pihak yang mendorong dialog dan penyelesaian sengketa secara damai. Peran tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia tanpa terikat pada kepentingan blok kekuatan tertentu. (United Nations, 1945, Art. 2(4))

Dengan demikian, posisi Indonesia terhadap konflik Iran–Israel tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan komitmen terhadap nilai-nilai perdamaian internasional. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

3.10 Prospek Perdamaian dan Stabilitas Kawasan Timur Tengah

Prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor yang terlibat untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian sengketa secara

damai. Konflik Iran–Israel yang berlangsung selama beberapa dekade menunjukkan bahwa pendekatan militer belum mampu menghasilkan solusi yang permanen. Sebaliknya, penggunaan kekuatan sering kali memicu siklus kekerasan baru yang memperpanjang ketidakstabilan kawasan. (Buana et al., 2024)

Dalam perspektif hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai merupakan prinsip fundamental yang harus diutamakan oleh setiap negara. Piagam PBB mengharuskan negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan internasional melalui cara-cara damai guna menghindari ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. (United Nations, 1945, Art. 2(4)) Oleh karena itu, diplomasi tetap menjadi instrumen yang paling relevan dalam mengurangi ketegangan antara Iran dan Israel.

Peran organisasi internasional, khususnya PBB, menjadi sangat penting dalam mendorong terciptanya ruang dialog yang konstruktif. Selain itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang lebih seimbang dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan geopolitik semata. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Meskipun demikian, upaya perdamaian menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kepentingan politik, keamanan, dan ideologi antara Iran dan Israel sering kali menghambat proses negosiasi. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor regional maupun global menyebabkan konflik menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan dalam waktu singkat.



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Srijantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-625568

Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu faktor utama adalah tingginya tingkat ketidakpercayaan antara Iran dan Israel yang telah terbentuk selama beberapa dekade. Ketidakpercayaan tersebut menyebabkan setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak sering kali ditafsirkan sebagai ancaman oleh pihak lainnya, sehingga memperbesar potensi eskalasi konflik.

Di samping itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat juga memengaruhi proses penyelesaian konflik. Dukungan yang diberikan kepada salah satu pihak sering kali menimbulkan persepsi ketidakseimbangan dalam proses diplomasi sehingga menyulitkan terciptanya solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran organisasi internasional dan negara-negara netral menjadi penting dalam menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif.

Dalam jangka panjang, stabilitas kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada kemampuan negara-negara yang terlibat untuk membangun mekanisme keamanan kolektif yang mampu mengurangi risiko konflik bersenjata. Pendekatan tersebut memerlukan komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan negara, menghindari penggunaan kekuatan secara sepihak, serta mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran akan dampak ekonomi dan keamanan yang ditimbulkan oleh konflik dapat menjadi faktor pendorong bagi para pihak untuk mencari solusi yang lebih

berkelanjutan. Stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki arti penting tidak hanya bagi negara-negara di kawasan, tetapi juga bagi perekonomian dan keamanan global secara keseluruhan. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

Eskalasi konflik Iran–Israel berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas keamanan regional dan global. Selain meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik tersebut juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi internasional, termasuk negara-negara yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Koloay, Cecep & Miknamara, 2024)

Oleh karena itu, prospek perdamaian di Timur Tengah sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk mengutamakan dialog, menghormati hukum internasional, serta mengedepankan kepentingan perdamaian bersama dibandingkan kepentingan politik jangka pendek. Melalui pendekatan tersebut, peluang untuk menciptakan stabilitas kawasan yang berkelanjutan akan menjadi lebih terbuka. (United Nations, 1945, Art. 2(4))"

3.11 Pengaruh Konflik Iran–Israel terhadap Keamanan Internasional

Konflik Iran–Israel tidak hanya berdampak terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan internasional secara luas. Eskalasi konflik yang melibatkan kedua negara berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik global karena keduanya memiliki hubungan dengan berbagai aktor internasional yang berkepentingan di kawasan. Dalam kondisi tertentu, konflik yang bersifat regional dapat



berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila melibatkan negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung Israel menunjukkan bahwa konflik Iran–Israel memiliki dimensi internasional yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global. Dukungan politik dan militer yang diberikan Amerika Serikat sering kali memengaruhi respons negara-negara lain terhadap konflik tersebut. Di sisi lain, Iran juga memiliki hubungan dengan berbagai aktor regional yang dapat memperluas dampak konflik terhadap keamanan internasional. (Budi, Gultom & Widjayanto, 2025) (Buana et al., 2024)

Dari perspektif hukum internasional, meningkatnya penggunaan kekuatan militer dalam konflik Iran–Israel dapat menimbulkan tantangan terhadap efektivitas sistem keamanan kolektif yang dibangun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antarnegara yang dapat mengancam perdamaian dunia. Oleh karena itu, setiap tindakan militer yang berpotensi memperluas konflik harus dinilai secara hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. (United Nations, 1945, Art. 2(4)) (United Nations, 1945, Art. 51)

Selain aspek keamanan, konflik yang berkepanjangan juga berpotensi memicu krisis kemanusiaan, migrasi penduduk, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat dirasakan oleh berbagai negara di luar kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, penyelesaian

konflik Iran–Israel tidak hanya menjadi kepentingan negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan internasional secara keseluruhan. (Purnawarman, Menne & Yusuf, 2026)

3.12 Tantangan Penegakan Hukum Internasional dalam Konflik Iran–Israel

Salah satu persoalan utama dalam konflik Iran–Israel adalah bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara efektif di tengah kepentingan politik dan keamanan negara-negara yang terlibat. Meskipun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatur larangan penggunaan kekuatan dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, implementasi ketentuan tersebut sering menghadapi berbagai hambatan dalam praktik hubungan internasional. (United Nations, 1945, Art. 2(4))

Dalam banyak kasus, negara cenderung menafsirkan ketentuan hukum internasional sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan mengenai legalitas tindakan militer yang dilakukan atas dasar hak membela diri (self-defence). Amerika Serikat dan Israel sering menggunakan alasan perlindungan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan militernya, sedangkan pihak lain memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. (United Nations, 1945, Art. 51) (Dinstein, 2022)

Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor



**AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL
TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK
KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI
HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

Pudoli Sandra, Dwi Sriyantini

ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026

E-ISSN: 3109-625570

politik dan keseimbangan kekuatan antarnegara. Dalam kondisi tertentu, negara yang memiliki pengaruh politik dan militer yang besar cenderung memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan narasi hukum yang digunakan untuk membenarkan tindakannya di tingkat internasional. (Buana et al., 2024)

Selain itu, mekanisme penegakan hukum internasional juga menghadapi keterbatasan karena tidak adanya otoritas supranasional yang memiliki kemampuan untuk memaksa seluruh negara mematuhi hukum internasional secara efektif. Akibatnya, penyelesaian berbagai sengketa internasional sering kali lebih dipengaruhi oleh proses diplomasi dan negosiasi politik dibandingkan mekanisme hukum semata. (United Nations, 1945, Art. 2(4))

Dengan demikian, konflik Iran–Israel menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk menghormati norma yang telah disepakati bersama. Tanpa adanya komitmen tersebut, hukum internasional akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. (United Nations, 1945, Art. 2(4)) (United Nations, 1945, Art. 51) (Dinstein, 2022)

4. KESIMPULAN

Konflik antara Iran dan Israel merupakan sebuah persoalan geopolitik yang melibatkan tidak hanya kedua negara tersebut, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dukungan politik dan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel

menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar sengketa bilateral.

Dari sudut pandang hukum internasional, evaluasi terhadap penggunaan kekuatan terhadap Iran harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan antara negara. Legalitas dari tindakan tersebut tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum internasional, termasuk prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan hak untuk membela diri.

Selain mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, konflik ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi global dan Indonesia. Oleh karena itu, resolusi konflik melalui pendekatan diplomatik dan penghormatan terhadap hukum internasional merupakan langkah krusial untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di tingkat internasional.

Selain menggambarkan keterkaitan antara konflik Iran–Israel dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional masih sering dijadikan alat oleh negara-negara untuk mempertahankan kepentingan strategis mereka. Keadaan ini mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ditujukan untuk memelihara perdamaian global.

Penelitian ini menekankan bahwa penyelesaian konflik antara Iran dan Israel membutuhkan pendekatan yang tidak hanya



fokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan politik, ekonomi, dan hukum internasional dengan seimbang. Dengan demikian, penguatan diplomasi multilateral, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan optimalisasi peran organisasi internasional menjadi faktor vital dalam mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aldino Cakra Buana, Androni Last Son Bless, Muhammad Firdaus Rajendra, dan Shultan Octadia Cahya. "Analisis Keamanan Timur Tengah: Eskalasi Konflik Israel-Iran." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 6, 2024

Budi, Nugroho Sulisty, Edmund Gultom, dan Joni Widjayanto. "Implikasi Konflik Iran-Israel bagi Kebijakan Pertahanan Indonesia (Sebuah Refleksi Historis dari Pembelajaran Perang Diponegoro untuk Ketahanan Nasional)." *Bappenas Working Papers*, Vol. 8, No. 3, 2025: 405–421. DOI: 10.47266/bwp.v8i3.468..

Dinstein, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Gray, Christine. *International Law and the Use of Force*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Koloay, Jorry S., Cecep, dan Miknamara. "Pengaruh Konflik Israel-Iran terhadap Keamanan Kawasan Regional dan Global." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 9, 2024:6079–6086

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 (United Nations Charter)*. New York: United Nations, 1945.

Ruys, Tom, Olivier Corten, dan Alexandra Hofer (eds.). *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Purnawarman, Andi, Firman Menne, dan Muhammad Yusuf. "Konflik AS–Israel dan Iran serta Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi Global dan Ketahanan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 26, No. 1, 2026. DOI: 10.35965/eco.v26i1.8933.

United Nations General Assembly. *Resolution 3314 (XXIX): Definition of Aggression*. New York: United Nations, 1974.

